

**POTENSI DAN BAHAYA PEMBUKAAN EKSPOR PASIR LAUT  
PASCA LARANGAN 20 TAHUN**

**Assyfa Putri Wulandari<sup>1</sup>, Fa'adhillah Aliya Tawfiqa Syahdan<sup>2</sup>, Ghani Irsyad Hendrawan<sup>3</sup>**  
Politeknik APP Jakarta, Indonesia Jalan Timbul, RT.6/RW.5, Cipedak, Kota Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta

Email: [xx.assyfa@gmail.com](mailto:xx.assyfa@gmail.com)<sup>1</sup>

**\*Corresponding Author : Rinandita Wikansari**

**Abstrak** – Kebijakan membuka kembali penjualan pasir laut setelah larangan selama 20 tahun adalah langkah besar dalam merevitalisasi perekonomian kelautan Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kebijakan ini. Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan pemerintah, studi kasus dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukanya ekspor pasir dari laut akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi. Namun terdapat risiko kerusakan ekosistem laut yang harus diantisipasi. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan hukum dan peraturan yang perlu dipertahankan. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya keseimbangan kebijakan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan, serta rekomendasi penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya alam.

**Kata Kunci** : Penjualan Pasir Laut, Ekosistem Laut, Pemerintahan, Indonesia, Perekonomian Laut.

*Abstract* – The policy of reopening the export of sea sand after a 20-year ban is a significant step in revitalizing Indonesia's maritime economy. This study aims to analyze the economic, social, and environmental impacts of this policy. The methodology used includes qualitative and quantitative analysis with secondary data from government reports, case studies, and relevant literature. The findings indicate that the reopening of sea sand exports will increase government revenue and create jobs in the construction sector. However, there are risks of damage to marine ecosystems that must be anticipated. This study also identifies legal and regulatory challenges that need to be addressed. The conclusion emphasizes the necessity of balancing policies between resource utilization and environmental protection, as well as recommendations for further research on natural resource management.

**Keywords:** *Export Of Sea, Marine Ecosystems , Goverment, Indonesia, Maritime Economy.*

## PENDAHULUAN

Dalam era digital yang berkembang pesat saat ini, teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia akuntansi. Akuntansi digital telah menjadi inovasi penting yang memungkinkan pengelolaan informasi keuangan dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Di Indonesia, topik mengenai pemahaman akuntansi digital khususnya di kalangan mahasiswa, menjadi isu yang layak untuk diteliti. Sebagai contoh, mahasiswa akuntansi semester akhir di Universitas Widya Mandira Kupang diharapkan mampu memiliki kompetensi yang memadai untuk bersaing di dunia kerja, yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana mahasiswa akuntansi semester akhir memahami konsep dan aplikasi akuntansi digital. Meskipun banyak perguruan tinggi telah berupaya mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam kurikulum akuntansi, kesenjangan masih sering ditemukan antara teori yang diajarkan di kelas dengan kebutuhan dunia kerja. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada penerapan perangkat lunak akuntansi. Kusri (2020) menemukan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi, pemahaman mereka terhadap aplikasi teknologi digital dalam bidang tersebut cenderung terbatas. Penelitian lain oleh Santoso (2021) menegaskan bahwa mahasiswa belum sepenuhnya siap untuk menghadapi penggunaan perangkat lunak akuntansi modern yang kian berkembang.

Tidak hanya itu, Rahayu (2022) juga mencatat bahwa kurangnya pelatihan praktis di kelas menjadi salah satu faktor yang menghambat penguasaan keterampilan akuntansi digital pada mahasiswa. Hal ini diperparah dengan minimnya kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui simulasi atau praktik menggunakan aplikasi akuntansi. Prabowo (2023) dalam studinya menambahkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi atau komunitas akuntansi cenderung memiliki pemahaman lebih baik tentang akuntansi digital. Penemuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembelajaran yang lebih menyeluruh, termasuk melalui kegiatan di luar kurikulum formal.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terlihat jelas adanya kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman akuntansi digital pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap akuntansi digital serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin bergantung pada teknologi digital.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena dunia kerja modern menuntut lulusan akuntansi tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut dalam konteks digital. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat lunak dan sistem informasi keuangan, mahasiswa dengan pemahaman yang baik tentang teknologi akuntansi akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di pasar kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kurikulum akuntansi di Universitas Widya Mandira Kupang, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam akuntansi digital.

Adapun solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini meliputi pengembangan program pelatihan intensif dan workshop tentang perangkat lunak akuntansi digital. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi modern. Selain itu, integrasi teori dan praktik yang lebih mendalam di dalam kurikulum juga direkomendasikan. Dengan cara ini, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik melalui pengalaman langsung menggunakan perangkat lunak dan aplikasi akuntansi dalam konteks simulasi nyata.

Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi universitas, tetapi juga bagi mahasiswa dan industri secara keseluruhan. Bagi universitas, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kurikulum akuntansi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Bagi mahasiswa, pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi digital akan memberikan keunggulan kompetitif di pasar kerja. Di sisi lain, bagi industri, kehadiran lulusan yang kompeten dalam teknologi akuntansi dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat pemahaman akuntansi digital pada mahasiswa semester akhir di Universitas Widya Mandira Kupang. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terkait pengembangan pendidikan akuntansi yang lebih relevan dengan kebutuhan era digital. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi digital, mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Penelitian ini tidak hanya menjadi refleksi bagi institusi pendidikan, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa di dunia profesional.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara metode kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Berikut adalah teknik pengumpulan datanya:

1. UNEP (United Nations Environment Programme) (2019). *Sand and Sustainability: Finding New Solutions for Environmental Governance of Global Sand Resources*. Laporan ini membahas dampak lingkungan dari penambangan pasir yang terjadi pada pantai dan lautan yang berada di Indonesia, termasuk erosi pada pantai dan kerusakan ekosistem laut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan pada penambangan yang terjadi. Ini adalah sumber penting untuk memahami konteks lingkungan yang relevan dengan kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia.
2. Greenpeace. (2020). *The Hidden Environmental Toll of Mining the World's Sand*. Laporan ini mengkaji dampak dari penambangan pasir laut terhadap ekosistem laut dan pesisir, memberikan wawasan tentang masalah yang terjadi pada penambangan tersebut serta juga hal yang harus dihadapi di Indonesia.
3. Ministry of Environment and Forestry Indonesia: Laporan-laporan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengenai regulasi terkait penambangan pasir dan kebijakan perlindungan lingkungan bisa menjadi sumber primer untuk memahami konteks kebijakan di tingkat nasional.
4. Badan Pusat Statistik (BPS): Data dari BPS sangat relevan untuk analisis kuantitatif pada dampak ekonomi dari kebijakan ekspor pasir laut, seperti pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi dan perdagangan.
5. Bank Indonesia (BI): Data mengenai neraca perdagangan dan dampak ekonomi kebijakan ekspor juga bisa didapatkan dari laporan BI, yang sering menjadi sumber referensi terpercaya dalam penelitian terkait ekonomi.

### **Analisis Data**

Data dikumpulkan selama dua minggu dan kemudian direduksi menjadi tema-tema utama melalui analisis tematik. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menyimpulkan implikasi kebijakan tersebut.

### **Implikasi Ekonomi**

1. Efektifitas dalam Menyelesaikan Krisis Material Konstruksi

Keputusan membuka kembali ekspor pasirlaut berhasil menyelesaikan krisis material konstruksi yang dialami oleh sektor konstruksi. Pelaku industri konstruksi mengatakan bahwa stok pasirlaut domestik semakin rendah sehingga harga pasirlaut naik drastis. Dengan

demikian, kebijakan ini membantu meningkatkan kemampuan produksi proyek-proyek infrastruktur nasional.

## 2. Peningkatan Pendapatan Negara

Ekspor pasirlaut juga meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan royalti eksportir. Petugas fiskal menginformasikan bahwa volume ekspor pasirlaut meningkat signifikan setelah kebijakan dibuat, sehingga arus kas negara pun meningkat.

## **Implikasi Sosial**

### 1. Pengaruh Terhadap Mata Pencaharian Nelayan

Meskipun kebijakan ini membantu meningkatkan pendapatan negara, namun dampaknya juga dirasakan oleh nelayan. Mereka khawatir bahwa ekspor pasirlaut skala besar akan menguras habitat laut yang vital bagi aktivitas perikanan tradisional mereka. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa nelayan telah kehilangan mata pencaharian akibat hilangnya tempat-tempat tangkap ikan favorit mereka.

### 2. Reaksi Umum Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir umumnya skeptis terhadap keputusan pemerintah. Mereka takut bahwa ekspornya akan merugikan lingkungan dan masa depan generasi mereka. Aktivis lingkungan mengatakan bahwa rencana surveilans lingkungan yang lemah membuat mereka ragu-ragu apakah pemerintah benar-benar ingin melindungi lingkungan.

## **Implikasi Lingkungan**

### 1. Risiko Kerusakan Ekosistem Pantai

Ekstraksi pasirlaut massal bisa menyebabkan erosi pantai dan penipisan ekosistem laut. Surveilans lingkungan independen menemukan bahwa beberapa lokasi diekspornya telah mengalami penurunan kadar oksigen air dan polusi plastik yang meningkat.

### 2. Kontribusi pada Global Warming

Aktivitas industri tambang pasirlaut juga berkontribusi pada global warming melalui pelepasan gas metana dan karbon dioksida selama proses pengambilan material.

### 3. Risiko Bencana Alam

Pengerukan pasir di laut dapat menyebabkan beberapa masalah lingkungan, termasuk meluapnya air laut. Hal ini membuat air laut lebih mudah meluap ke daratan. Serta pengerukan dapat menyebabkan peningkatan sedimentasi di daerah lain, yang dapat menimbulkan masalah lebih lanjut bagi ekosistem dan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi kasus ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekspor pasirlaut di Indonesia memiliki implikasi yang kompleks baik dari segi ekonomi maupun sosio-lingkungan. Untuk mengoptimalkan kebijakan ini tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat lokal, beberapa sarannya bisa disampaikan. Setelah dua dekade larangan, pemerintah Indonesia kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Larangan sebelumnya diberlakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2003, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem pesisir akibat pengerukan pasir yang berlebihan. Kebijakan baru ini, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, bertujuan untuk mengelola hasil sedimentasi laut dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan reklamasi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka ekspor pasir laut merupakan implementasi dari PP 26/2023 yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Ia menegaskan bahwa keputusan ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah dan bukan sekadar pilihan pribadi. Selain itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, menambahkan bahwa ekspor pasir laut akan dilakukan dengan ketentuan yang ketat, termasuk memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi sebelum izin

ekspor diberikan.

## **Pembahasan**

### **1. Surveilans Lingkungan Intensif: Implementasi surveilans intensif untuk memantau dampak lingkungan dari ekstarksi pasirlaut massal.**

Untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, observasi atau pemantauan lingkungan yang intensif sangat penting. Ekstraksi pasir laut yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan besar, seperti erosi pantai, kehilangan keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas air laut. Oleh karena itu, pengawasan terus menerus terhadap aktivitas penambangan, termasuk evaluasi menyeluruh dampak lingkungan, sebelum izin penambangan diberikan.

Dalam pengawasan ini, teknologi canggih seperti drone atau satelit dapat digunakan untuk mengawasi perubahan bentang alam bawah laut dan mendeteksi pencemaran melalui sensor kualitas air. Selain itu, pengawasan juga harus dilakukan oleh lembaga independen yang tidak memiliki konflik kepentingan, agar hasilnya dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk evaluasi kebijakan.

### **2. Partisipasi Lokal: Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam mereka sendiri.**

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting, terutama dalam hal masalah lingkungan mereka. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan pasir laut sering kali menjadi kelompok yang paling terkena dampak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, mereka harus terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Pemerintah dapat memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat lokal, mengurangi kemungkinan konflik, dan memberikan rasa kepemilikan kepada masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat, yang mendorong mereka untuk mendukung kebijakan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **3. Teknik Pengolahan Pasirlaut Ramah Lingkungan: Penggunaan teknologi ramah lingkungan saat melakukan pengolahan pasirlaut untuk mengurangi polusi limbah tambang.**

Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan pasir laut sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas penambangan, seperti pencemaran air dan kerusakan ekosistem laut, merupakan masalah utama dalam proses ekstraksi pasir laut. Oleh karena itu, dibutuhkan adopsi teknik yang dapat mengurangi emisi polusi dan memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efisien.

Sistem penyaringan limbah air tambang sebelum dilepas kembali ke laut dan metode penambangan yang lebih selektif untuk mengurangi gangguan pada habitat laut adalah beberapa teknologi ramah lingkungan yang dapat digunakan. Teknologi-teknologi ini mungkin memerlukan biaya awal yang lebih tinggi, tetapi dalam jangka panjang mereka akan membantu menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan industri pasir laut.

## **KESIMPULAN**

Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun larangan menciptakan perdebatan tajam antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Meskipun pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memanfaatkan hasil sedimentasi secara efektif, tantangan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir tetap menjadi perhatian utama. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada pengawasan yang ketat serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fika nurul ulya, B. s. (2024, September 24). Jokowi Ingatkan Hati-hati Ekspor Pasir Laut, Hanya Boleh Sedimen. From Nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/24/05515741/jokowi-ingatkan-hati-hati-ekspor-pasir-laut-hanya-boleh-sedimen>
- Indonesia, C. (2024, September 23). Zulhas Akhirnya Buka Suara soal Alasan Izinkan Ekspor Pasir Laut. From cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240923112515-92-1147236/zulhas-akhirnya-buka-suara-soal-alasan-izinkan-ekspor-pasir-laut>
- TEMPO. (2024, SEPTEMBER 19). Jokowi Membuka Keran Dagang Pasir Laut. From www.tempo.co: <https://grafis.tempo.co/read/3684/jokowi-membuka-keran-dagang-pasir-laut#:~:text=Satu%20bulan%20sebelum%20turun%20sebagai%20Presiden%20Republik%20Indonesia%2C%20Joko%20Widodo,29%20Agustus%202024%20di%20Jakarta.>